



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

a.	pendapatan, terdiri atas:		
1.	pendapatan asli daerah	Rp	4.402.192.318.342,00
2.	pendapatan transfer	Rp	3.578.770.570.116,00
3.	lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	42.497.100,00
	jumlah pendapatan	Rp	7.981.005.385.558,00
b.	belanja, terdiri atas:		
1.	belanja operasi		
a)	belanja pegawai	Rp	2.286.075.345.833,00
b)	belanja barang dan jasa	Rp	2.370.838.280.571,00
c)	belanja bunga	Rp	0,00
d)	belanja subsidi	Rp	0,00
e)	belanja hibah	Rp	385.571.297.631,00
f)	belanja bantuan sosial	Rp	10.725.250.000,00
	jumlah belanja operasi	Rp	5.053.210.174.035,00
2.	belanja modal, terdiri atas:		
a)	belanja modal tanah	Rp	227.277.177.586,00
b)	belanja modal peralatan dan mesin	Rp	324.366.940.867,00
c)	belanja modal gedung dan bangunan	Rp	580.639.094.647,00
d)	belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	Rp	833.196.833.734,00

e) belanja ...

	e)	belanja modal aset tetap lainnya	Rp	36.063.250.751,00
	f)	belanja modal aset lainnya		851.850.000,00
	g)	belanja modal aset tidak berwujud	Rp	0,00
		jumlah belanja modal	Rp	<u>2.002.395.147.585,00</u>
	3.	belanja tidak terduga	Rp	14.997.736.734,00
	4.	belanja transfer	Rp	819.921.420.195,00
		jumlah belanja surplus/ (defisit)	Rp	<u>7.890.524.478.549,00</u>
			Rp	90.480.907.009,00
c.		pembiayaan, terdiri atas:		
	1.	penerimaan pembiayaan	Rp	928.757.388.059,00
	2.	pengeluaran pembiayaan	Rp	10.000.000.000,00
		jumlah pembiayaan netto	Rp	<u>918.757.388.059,00</u>
		sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	<u>1.009.238.295.068,00</u>

Pasal ...

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penjabaran laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 12 September 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 12 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

SOMAATMAJA

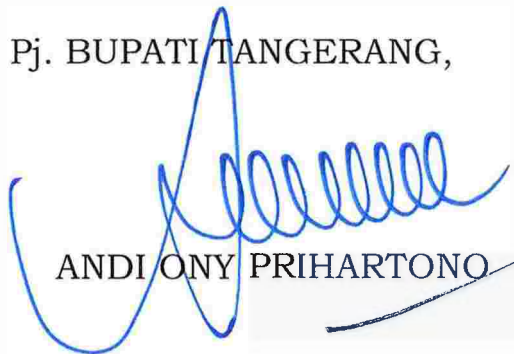
LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR ... TAHUN 2024
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.921.509.859.008,00	4.402.192.318.342,00	480.682.459.334,00	112,26
4.1.01	Pajak Daerah	3.121.400.000.000,00	3.490.363.924.921,00	368.963.924.921,00	111,82
4.1.02	Retribusi Daerah	103.578.144.366,00	123.597.357.167,00	20.019.212.801,00	119,33
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.374.129.692,00	64.854.494.983,00	480.365.291,00	100,75
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	632.157.584.950,00	723.376.541.271,00	91.218.956.321,00	114,43
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.479.219.718.276,00	3.578.770.570.116,00	99.550.851.840,00	102,86
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.725.699.768.389,00	2.721.591.805.338,00	(4.107.963.051,00)	99,85
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	753.519.949.887,00	857.178.764.778,00	103.658.814.891,00	113,76
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.497.100,00	42.497.100,00	0,00	100,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	42.497.100,00	42.497.100,00	0,00	100,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	7.400.772.074.384,00	7.981.005.385.558,00	580.233.311.174,00	107,84
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	5.398.866.198.316,00	5.053.210.174.035,00	(345.656.024.281,00)	93,60
5.1.01	Belanja Pegawai	2.356.563.221.644,00	2.286.075.345.833,00	(70.487.875.811,00)	97,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.646.224.810.280,00	2.370.838.280.571,00	(275.386.529.709,00)	89,59
5.1.05	Belanja Hibah	384.613.766.392,00	385.571.297.631,00	957.531.239,00	100,25
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.464.400.000,00	10.725.250.000,00	(739.150.000,00)	93,55
5.2	BELANJA MODAL	2.080.913.695.955,00	2.002.395.147.585,00	(78.518.548.370,00)	96,23
5.2.01	Belanja Modal Tanah	231.881.692.143,00	227.277.177.586,00	(4.604.514.557,00)	98,01
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.565.730.808,00	324.366.940.867,00	(19.198.789.941,00)	94,41
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	605.553.301.896,00	580.639.094.647,00	(24.914.207.249,00)	95,89
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	862.070.869.475,00	833.196.833.734,00	(28.874.035.741,00)	96,65
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.961.941.633,00	36.063.250.751,00	(898.690.882,00)	97,57
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	880.160.000,00	851.850.000,00	(28.310.000,00)	96,78
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.684.278.560,00	14.997.736.734,00	(4.686.541.826,00)	76,19
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	19.684.278.560,00	14.997.736.734,00	(4.686.541.826,00)	76,19

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.4	BELANJA TRANSFER	820.065.289.612,00	819.921.420.195,00	(143.869.417,00)	99,98
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	327.417.814.437,00	327.417.814.437,00	0,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	492.647.475.175,00	492.503.605.758,00	(143.869.417,00)	99,97
	JUMLAH BELANJA DAERAH	8.319.529.462.443,00	7.890.524.478.549,00	(429.004.983.894,00)	94,84
	SURPLUS / (DEFISIT)	(918.757.388.059,00)	90.480.907.009,00	1.009.238.295.068,00	(9,85)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	928.757.388.059,00	928.757.388.059,00	0,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	928.757.388.059,00	928.757.388.059,00	0,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	918.757.388.059,00	918.757.388.059,00	0,00	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	1.009.238.295.068,00	1.009.238.295.068,00	0,00

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO

LAMPIRAN I.1
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR ... TAHUN 2024
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2023

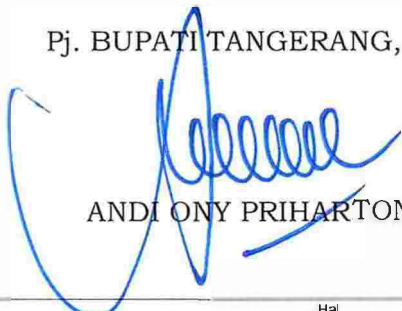
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Satuan Kerja : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASARHUKUM/KETERANGAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.016.296.515.915,00	985.221.342.110,00	(31.075.173.805,00)	96,94	
1.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKNERJA PERANGKAT DAERAH	1.032.410.354,00	971.888.230,00	(60.522.124,00)	94,14	
1.01.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKATDAERAH	784.184.354,00	735.745.230,00	(48.439.124,00)	93,82	Lokasi:
1.01.01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	784.184.354,00	735.745.230,00	(48.439.124,00)	93,82	
1.01.01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.184.354,00	735.745.230,00	(48.439.124,00)	93,82	
1.01.01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	63.410.292,00	53.793.630,00	(9.616.662,00)	84,83	
1.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.410.292,00	53.793.630,00	(9.616.662,00)	84,83	
1.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.850.292,00	9.983.630,00	(866.662,00)	92,01	
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 10.850.292)
1.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.560.000,00	43.810.000,00	(8.750.000,00)	83,35	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 52.560.000)
1.01.01.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	720.774.062,00	681.951.600,00	(38.822.462,00)	94,61	
1.01.01.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	412.356.062,00	374.631.600,00	(37.724.462,00)	90,85	
1.01.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 30.600.000)
1.01.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM / KETERANGAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	Perlindungan Masyarakat					Belanja Jasa Tenaga Keterampilan, Keterampilan Umum, dan Perlindungan Masyarakat (1 paket x Rp. 182,000,000)
8.01.06.2.01.04.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	Rp. 182.000.000,00
						Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (1 paket x Rp. 20,000,000)
8.01.06.2.01.04.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.696.600,00	15.000.000,00	(3.696.600,00)	80,23	Rp. 20.000.000,00
8.01.06.2.01.04.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.696.600,00	15.000.000,00	(3.696.600,00)	80,23	
						Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (1 Paket x Rp. 18.696.600)
8.01.06.2.01.04.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	103.190.000,00	93.750.000,00	(9.440.000,00)	90,85	Rp. 18.696.600,00
8.01.06.2.01.04.5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/ Wisma /Bungalow / Tempat Peristirahatan	50.000.000,00	42.000.000,00	(8.000.000,00)	84,00	
						Belanja Sewa Mess / Wisma/ Bungalow / Tempat Peristirahatan (1 paket x Rp. 50.000,000)
8.01.06.2.01.04.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	53.190.000,00	51.750.000,00	(1.440.000,00)	97,29	Rp. 50.000.000,00
						Belanja Sewa Hotel (1 Paket x Rp. 53.190,000)
8.01.06.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	119.460.000,00	111.347.760,00	(8.112.240,00)	93,21	Rp. 50.000.000,00
8.01.06.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	119.460.000,00	111.347.760,00	(8.112.240,00)	93,21	
8.01.06.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.460.000,00	111.347.760,00	(8.112.240,00)	93,21	
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa(1 Paket x Rp. 119.460,000)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	79.973.406.862,00	78.116.469.989,00	(1.856.936.873,00)	97,68	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(79.973.406.862,00)	(78.116.469.989,00)	1.856.936.873,00	97,68	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(79.973.406.862,00)	(78.116.469.989,00)	1.856.936.873,00	97,68	

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penjabaran laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 12 September 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 12 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

SOMAATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 21

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Pt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	
Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR ... TAHUN 2024
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

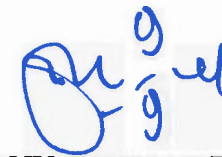
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.921.509.859.008,00	4.402.192.318.342,00	480.682.459.334,00	112,26
4.1.01	Pajak Daerah	3.121.400.000.000,00	3.490.363.924.921,00	368.963.924.921,00	111,82
4.1.02	Retribusi Daerah	103.578.144.366,00	123.597.357.167,00	20.019.212.801,00	119,33
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.374.129.692,00	64.854.494.983,00	480.365.291,00	100,75
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	632.157.584.950,00	723.376.541.271,00	91.218.956.321,00	114,43
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.479.219.718.276,00	3.578.770.570.116,00	99.550.851.840,00	102,86
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.725.699.768.389,00	2.721.591.805.338,00	(4.107.963.051,00)	99,85
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	753.519.949.887,00	857.178.764.778,00	103.658.814.891,00	113,76
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.497.100,00	42.497.100,00	0,00	100,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	42.497.100,00	42.497.100,00	0,00	100,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	7.400.772.074.384,00	7.981.005.385.558,00	580.233.311.174,00	107,84
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	5.398.866.198.316,00	5.053.210.174.035,00	(345.656.024.281,00)	93,60
5.1.01	Belanja Pegawai	2.356.563.221.644,00	2.286.075.345.833,00	(70.487.875.811,00)	97,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.646.224.810.280,00	2.370.838.280.571,00	(275.386.529.709,00)	89,59
5.1.05	Belanja Hibah	384.613.766.392,00	385.571.297.631,00	957.531.239,00	100,25
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.464.400.000,00	10.725.250.000,00	(739.150.000,00)	93,55
5.2	BELANJA MODAL	2.080.913.695.955,00	2.002.395.147.585,00	(78.518.548.370,00)	96,23
5.2.01	Belanja Modal Tanah	231.881.692.143,00	227.277.177.586,00	(4.604.514.557,00)	98,01
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.565.730.808,00	324.366.940.867,00	(19.198.789.941,00)	94,41
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	605.553.301.896,00	580.639.094.647,00	(24.914.207.249,00)	95,89
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	862.070.869.475,00	833.196.833.734,00	(28.874.035.741,00)	96,65
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.961.941.633,00	36.063.250.751,00	(898.690.882,00)	97,57
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	880.160.000,00	851.850.000,00	(28.310.000,00)	96,78
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.684.278.560,00	14.997.736.734,00	(4.686.541.826,00)	76,19
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	19.684.278.560,00	14.997.736.734,00	(4.686.541.826,00)	76,19

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.4	BELANJA TRANSFER	820.065.289.612,00	819.921.420.195,00	(143.869.417,00)	99,98
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	327.417.814.437,00	327.417.814.437,00	0,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	492.647.475.175,00	492.503.605.758,00	(143.869.417,00)	99,97
	JUMLAH BELANJA DAERAH	8.319.529.462.443,00	7.890.524.478.549,00	(429.004.983.894,00)	94,84
	SURPLUS / (DEFISIT)	(918.757.388.059,00)	90.480.907.009,00	1.009.238.295.068,00	(9,85)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	928.757.388.059,00	928.757.388.059,00	0,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	928.757.388.059,00	928.757.388.059,00	0,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	918.757.388.059,00	918.757.388.059,00	0,00	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	1.009.238.295.068,00	1.009.238.295.068,00	0,00

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	
Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO


LAMPIRAN I.1
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR ... TAHUN 2024
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Satuan/Kerja : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASARHUKUM/KETERANGAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5	BELANJA DAERAH					
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.016.296.515.915,00	985.221.342.110,00	(31.075.173.805,00)	96,84	
1.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	1.032.410.354,00	971.888.230,00	(60.522.124,00)	94,14	
1.01.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKATDAERAH	784.184.354,00	735.745.230,00	(48.439.124,00)	93,82	Lokasi:
1.01.01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	784.184.354,00	735.745.230,00	(48.439.124,00)	93,82	
1.01.01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.184.354,00	735.745.230,00	(48.439.124,00)	93,82	
1.01.01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	63.410.292,00	53.793.630,00	(9.616.662,00)	84,83	
1.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.410.292,00	53.793.630,00	(9.616.662,00)	84,83	
1.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.850.292,00	9.983.630,00	(866.662,00)	92,01	
						Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (1 paket x Rp. 10.850,292) Rp. 9850.292,00
1.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.560.000,00	43.810.000,00	(8.750.000,00)	83,35	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1 paket x Rp. 52.560,000) Rp. 52.560.000,00
1.01.01.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	720.774.062,00	681.951.600,00	(38.822.462,00)	94,61	
1.01.01.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	412.356.062,00	374.631.600,00	(37.724.462,00)	90,85	
1.01.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1 paket x Rp. 30.600,000) Rp. 30.600.000,00
1.01.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	%	DASAR HUKUM / KETERANGAN
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	Perlindungan Masyarakat					
						Belanja Jasa Tenaga Keteneteraman, Keteneteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (1 paket x Rp. 182.000.000)
8.01.06.2.01.04.5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	Rp. 182.000.000,00
						Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (1 paket x Rp. 20.000.000)
8.01.06.2.01.04.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.696.600,00	15.000.000,00	(3.696.600,00)	80,23	Rp. 20.000.000,00
8.01.06.2.01.04.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.696.600,00	15.000.000,00	(3.696.600,00)	80,23	
						Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (1 Paket x Rp. 18.696.600)
8.01.06.2.01.04.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	103.190.000,00	93.750.000,00	(9.440.000,00)	90,85	
8.01.06.2.01.04.5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/ Wisma / Bungalow/ Tempat Peristirahatan	50.000.000,00	42.000.000,00	(8.000.000,00)	84,00	
						Belanja Sewa Mess / Wisma/ Bungalow / Tempat Peristirahatan (1 paket x Rp. 50.000.000)
8.01.06.2.01.04.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	53.190.000,00	51.750.000,00	(1.440.000,00)	97,29	
						Belanja Sewa Hotel (1 Paket x Rp. 53.190.000)
8.01.06.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	119.460.000,00	111.347.760,00	(8.112.240,00)	93,21	
8.01.06.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	119.460.000,00	111.347.760,00	(8.112.240,00)	93,21	
8.01.06.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.460.000,00	111.347.760,00	(8.112.240,00)	93,21	
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa (1 Paket x Rp. 119.460.000)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	79.973.406.862,00	78.116.469.989,00	(1.856.936.873,00)	97,68	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(79.973.406.862,00)	(78.116.469.989,00)	1.856.936.873,00	97,68	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(79.973.406.862,00)	(78.116.469.989,00)	1.856.936.873,00	97,68	

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Pjt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	
Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Pj. BUPATI TANGERANG,

 23/04

ANDI ONY PRIHARTONO